

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Gramedia.

Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Lotulung, Paulus Efendi, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Salemba Humanika.

Marbun, S.F, 1997, *Hukum Administrasi dan Peradilan Adinistrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

—————, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari, 2000, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Purwaka, Tommy Hendran, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Ridwan, HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi//Tesis/Jurnal

Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama, *Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 30 Nomor 2 Juni 2018.

Husein Ahmad Effendi, “*Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Kajian Terhadap Pasal 21 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dikaitkan dengan Perma No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan*”

- Wewenang*”’. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019.
- Ira Halidayanti, *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”. Skripsi. Program Sarjana Universitas Padang 2014.
- Mesdiana Purba dan Nelvitia Purba, *Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) di dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) di dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Kultura Volume 14 1 September 2013.
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, *Problematisa Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia*, Jurnal Widya Pranata Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018.
- Rini Dameria,dkk, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung*, Diponegoro Law Jurnal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017.

Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Jurnal Nurani Hukum Volume 1 Nomor 1 Desember 2018.

Umar Dani, *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 7 Nomor 3 November 2018.

C. Hasil Penelitian

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Studi Banding ke Perancis Tentang Kompetensi Peradilan Administrasi*, Laporan Penelitian, Jakarta: 2009.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

Undang-Undang Nomor 51 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.

E. Wawancara

Abdullah Riziki Ardiansyah dan Eko Yulianto selaku Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang.